

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata *Glamping* di Kawasan Kareumbi Wetan, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung

Silvi Amalia², Irwandi²

¹Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, silviamalia576@gmail.com

²Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, irwandi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana pengembangan objek wisata *glamping* (*glamorous camping*) di kawasan Kareumbi Wetan, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Potensi alam yang masih alami dan berada dalam kawasan hutan konservasi menjadikan daerah ini memiliki daya tarik wisata tersendiri. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara dengan para pelaku wisata, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa. Pengembangan wisata *glamping* mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha, seperti penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, kerajinan tangan, serta jasa pemandu wisata. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, mulai dari pembangunan infrastruktur berbasis lokal hingga pemasaran digital berbasis komunitas. Kegiatan ini juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepemilikan terhadap aset wisata. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pengelolaan berkelanjutan, permodalan, serta pelatihan manajemen pariwisata bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Wisata Glamping, Kareumbi Wetan, Masyarakat Lokal, Pariwisata Berkelanjutan.*

Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi potensi lokal. Di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut inovasi dan adaptasi, sektor pariwisata menjadi salah satu alternatif unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki kekayaan alam dan budaya. Salah satu model pengembangan pariwisata yang belakangan ini berkembang pesat adalah *glamping* atau *glamorous camping*, yakni bentuk wisata berkemah dengan fasilitas modern dan nyaman yang tetap menjaga kedekatan dengan alam.

Kawasan Kareumbi Wetan, yang terletak di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam berupa hutan konservasi, perbukitan, serta udara sejuk yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Potensi ini menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata berbasis alam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat setempat. Melalui pengembangan objek wisata *glamping*, masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam berbagai lini kegiatan ekonomi, seperti pengelolaan *homestay* atau tenda *glamping*, penyediaan makanan dan minuman khas lokal, serta pelayanan kebersihan dan keamanan. Pelibatan ini menjadi penting sebagai bentuk pemberdayaan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama dalam proses peningkatan kualitas hidupnya.

Namun demikian, pemberdayaan ekonomi melalui sektor pariwisata tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap pelatihan dan modal usaha, serta belum optimalnya promosi wisata menjadi hambatan yang perlu dicermati. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang terpadu dan berkelanjutan agar pengembangan wisata *glamping* di Kareumbi Wetan benar-benar

memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Lebih jauh, keberhasilan pemberdayaan ekonomi melalui pariwisata juga sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa dan daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi yang mendukung pengembangan wisata, penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai, serta fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta dan investor juga diperlukan untuk memperkuat akses modal dan teknologi, terutama dalam pengembangan inovasi produk wisata dan pemasaran digital yang kini menjadi kunci dalam menarik minat wisatawan modern.

Selain aspek ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan glamping di wilayah ini juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Pengelolaan wisata yang ramah lingkungan dan menghargai kearifan lokal akan membantu menjaga kelestarian sumber daya alam serta nilai-nilai budaya yang menjadi daya tarik utama. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya sebagai sumber pendapatan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi pendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melihat potensi dan tantangan tersebut, pengembangan wisata glamping di Kareumbi Wetan hendaknya mengedepankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, hingga pelaksanaan program pemberdayaan. Pendekatan ini akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan wisata, sekaligus meminimalisasi konflik sosial dan memastikan manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan komitmen bersama, wisata glamping dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus pelestari lingkungan dan budaya yang berharga.

Tabel 1**Jenis Kegiatan Ekonomi Masyarakat Terkait Wisata Glamping Kreumbi Wetan**

No	Jenis Kegiatan Ekonomi	Bentuk Keterlibatan Masyarakat	Keterangan
1.	Penyediaan akomodasi (<i>glamping</i>)	Pengelolaan tenda, kebersihan	Dikelola oleh kelompok pemuda desa
2.	Kuliner lokal	Warung makan, catering wisata	Menyediakan makanan khas tradisional
3.	Jasa transportasi lokal	Ojek wisata, sewa kendaraan	Mengantar wisatawan dari akses jalan
4.	Jasa Pemandu wisata	Tour guide, tracking lokal	Terutama pemuda dan penggiat lingkungan

Sumber: Hasil Wawancara

Gambar 1
Aktivitas Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Glamping Kareumbi Wetan



Sumber: Instagram @glampingkareumbi 7 agustus 2024

Tinjauan Pustaka

Pengembangan pariwisata di suatu daerah memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi. Menurut Supriyadi dan Fitriani (2020), keberadaan tempat wisata mendorong tumbuhnya berbagai peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa wisata sebagai salah satu bentuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas, misalnya, memungkinkan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan potensi alam dan budaya mereka sehingga dapat menjadi daya tarik wisata yang unik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek wisata, melainkan juga sebagai subjek penggerak ekonomi melalui berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekonomi yang didorong oleh pariwisata meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagaimana dijelaskan oleh Handayani (2019), masyarakat yang diberdayakan secara ekonomi melalui sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena pariwisata menciptakan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari penyediaan jasa pemandu wisata, penginapan, kuliner, hingga penjualan kerajinan lokal. Keberadaan tempat wisata menjadi stimulus bagi pertumbuhan usaha lokal yang berorientasi pada pasar wisatawan.

Lebih jauh, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pariwisata juga terkait erat dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas daerah wisata. Menurut Wibowo dan Santoso (2021), investasi dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum lainnya tidak hanya menunjang kenyamanan wisatawan, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Infrastruktur yang memadai

memungkinkan produk-produk lokal lebih mudah dipasarkan serta membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi tersebut. Studi oleh Rahmawati et al. (2018) menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan wisata, mereka memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap destinasi wisata tersebut. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan produk wisata, yang secara tidak langsung meningkatkan daya saing destinasi. Selain itu, pemberdayaan ini juga mendorong keberlanjutan ekonomi lokal karena pendapatan yang diperoleh tetap berputar di dalam komunitas.

Namun, perlu diingat bahwa pengembangan wisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya alam dan budaya, serta ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan pengembangan kapasitas yang memadai agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, pengembangan tempat wisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan lokal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, melibatkan masyarakat secara aktif, dan pengembangan infrastruktur yang memadai, pariwisata dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat agar dapat mengakses dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan (Suharto, 2005). Dalam konteks ini, pemberdayaan mencakup peningkatan keterampilan, akses terhadap informasi, permodalan, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Iff dan Tesoriero (2008), pemberdayaan masyarakat tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang memperkuat kemandirian komunitas lokal.

Pariwisata berbasis masyarakat (CBT) adalah pendekatan pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat dari aktivitas pariwisata (Timothy, 2002). Dalam model ini, masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima dampak. CBT mendorong terciptanya inklusi sosial, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan CBT sangat relevan di wilayah pedesaan yang memiliki potensi alam dan kearifan lokal, termasuk dalam pengembangan wisata glamping.

Glamping adalah bentuk wisata alam yang menggabungkan pengalaman berkemah di alam terbuka dengan kenyamanan dan fasilitas modern. Menurut Brooker & Joppe (2014), glamping menawarkan alternatif wisata ramah lingkungan yang cocok dikembangkan di daerah dengan potensi alam yang tinggi, tanpa harus mengorbankan kenyamanan wisatawan. Pengembangan glamping dapat menjadi solusi inovatif dalam menarik wisatawan milenial yang mencari pengalaman autentik namun tetap praktis dan nyaman.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperluas jaringan usaha kecil dan menengah (UNWTO, 2018). Selain dampak langsung, sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect terhadap sektor-sektor terkait seperti transportasi, kuliner, dan kerajinan lokal.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial masyarakat, belum

optimalnya promosi dan pemasaran digital, serta persoalan keberlanjutan lingkungan (Scheyvens, 1999). Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem wisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan objek wisata glamping di Kareumbi Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan ekonomi secara mendalam dalam konteks lokal (Creswell, 2014). Subjek penelitian terdiri atas masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata, seperti pengelola glamping, pelaku UMKM, pemandu wisata, serta aparat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi visual, sebagaimana dianjurkan oleh Sugiyono (2017) dalam penelitian sosial berbasis lapangan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman (1994), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber informan, teknik pengumpulan, dan waktu pengamatan, sebagaimana dijelaskan oleh Patton (1999) bahwa triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber informan, teknik pengumpulan, dan waktu pengamatan, sebagaimana dijelaskan oleh Patton (1999) bahwa triangulasi memperkuat kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti juga merujuk pada beberapa artikel jurnal yang relevan untuk mengkonfirmasi hasil lapangan, di antaranya studi oleh Suansri (2003) tentang Community-Based Tourism dan artikel oleh Marzuki et al. (2012) mengenai dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat lokal.

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan praktik lapangan yang dilaksanakan di Desa Tanjungwangi, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam partisipasi dan kemandirian ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan informan kunci, ditemukan bahwa sejak pengembangan wisata glamping dimulai, masyarakat setempat semakin aktif terlibat dalam berbagai lini usaha yang mendukung kegiatan pariwisata. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan mitra pengelola wisata, seperti pelatihan pengelolaan homestay, pembuatan produk kuliner khas, serta pelatihan digital marketing, telah memberikan peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi masyarakat.

Beberapa warga yang sebelumnya tidak memiliki usaha kini mulai mengelola warung makan sederhana, atau menjual makanan tradisional. Kelompok ibu rumah tangga misalnya, berhasil membentuk usaha kolektif berbasis kuliner dengan sistem bagi hasil. Selain itu, pemuda desa terorganisasi dalam kelompok kerja pengelola glamping, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas, layanan tamu, dan promosi melalui media sosial. Dari sisi ekonomi, berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat peningkatan rata-rata pendapatan harian masyarakat sebesar 70–100% dibandingkan sebelum adanya kegiatan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Bahkan, beberapa keluarga mulai tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, melainkan juga sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama.

Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kerjasama antara pelaku usaha lokal dan pengelola glamping, sehingga tercipta ekosistem usaha yang saling mendukung. Hasil kegiatan juga menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai aset utama wisata, yang ditandai dengan inisiatif lokal dalam pengelolaan sampah dan konservasi hutan sekitar area glamping. Secara keseluruhan, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun semangat gotong royong, kemandirian, serta identitas kolektif sebagai tuan rumah wisata berbasis komunitas.

Tabel 2

Dampak Ekonomi Wisata *Glamping* Terhadap Pendapatan Masyarakat

No	Aspek	Sebelum Ada <i>Glamping</i>	Setelah Ada <i>Glamping</i>
1.	Rata-rata pendapatan harian	Rp. 50.000-Rp.75.000	Rp. 100.000-Rp. 150.000
2.	Jumlah tenaga kerja	12 Orang	20 Orang

Sumber: Hasil Wawancara

Gambar 2

Aktivitas Pengunjung dalam Pengalaman Menginap di Tenda Glamping Kareumbi Wetan



Sumber: Instagram @glampingkareumbi 7 agustus 2024

Pembahasan

Hasil wawancara dengan sejumlah informan dari masyarakat setempat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran aktif warga dalam kegiatan ekonomi berbasis wisata. Salah satu informan, pengelola glamping lokal, menyatakan bahwa sejak kawasan ini mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata, ia memperoleh tambahan pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya bergantung pada pertanian musiman. Ia juga mengakui adanya peningkatan kemampuan dalam melayani wisatawan, termasuk pemahaman tentang kebersihan, keramahan, dan pemasaran digital sederhana.

Informan lain, seorang ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok usaha kuliner, mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah desa sangat

membantu dalam pengolahan makanan dan pengemasan produk. Ia mengaku kini bisa menjual makanan ringan khas daerah kepada wisatawan dengan kemasan yang menarik, dan hasil penjualannya digunakan untuk menambah pendapatan keluarga. Pernyataan ini menunjukkan adanya proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan masyarakat, seperti yang disebutkan oleh Suansri (2003) dalam model *Community-Based Tourism*.

Selain itu, wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma dalam pembangunan desa. Kini, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Mereka menyampaikan bahwa pengembangan glamping Kareumbi Wetan. Selain itu, wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma dalam pembangunan desa. Kini, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Mereka menyampaikan bahwa pengembangan glamping Kareumbi Wetan telah menjadi katalisator perubahan yang signifikan dalam pola pikir dan strategi pembangunan desa. Pendekatan yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal dianggap lebih berkelanjutan dan berdampak luas dibandingkan pendekatan pembangunan tradisional yang cenderung top-down.

Aparat desa juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam mengelola wisata glamping. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat daya tawar dan kemandirian masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Namun, mereka mengakui masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, akses modal, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan dan program pelatihan yang intensif sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengelola usaha wisata dengan lebih profesional dan efektif.

Lebih lanjut, aparat desa mengungkapkan bahwa pengembangan glamping juga memberikan dampak positif pada aspek sosial budaya. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional sebagai bagian dari daya tarik wisata yang unik. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara gotong royong. Dengan demikian, wisata glamping tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas komunitas lokal. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan wisata glamping di Kareumbi Wetan memberikan dampak multidimensional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Keberhasilan ini dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain yang ingin mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan objek wisata glamping di Kareumbi Wetan telah berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai sektor pendukung wisata, seperti pengelolaan glamping, usaha kuliner, jasa pemandu, dan kerajinan tangan, menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, kolaborasi dengan pemerintah desa, serta terbentuknya kelompok usaha berbasis komunitas menjadi indikator bahwa pemberdayaan berjalan secara bertahap namun berdampak nyata. Selain aspek ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan sosial berupa peningkatan rasa percaya diri, kemandirian, dan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Meski demikian, beberapa tantangan masih

dihadapi, seperti keterbatasan akses permodalan, promosi digital, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan lokal, serta sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta agar pengembangan wisata glamping ini tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi temporer, tetapi juga mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penting untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam strategi pengembangan wisata guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana promosi dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengenalkan destinasi dan produk lokal secara lebih luas, sekaligus meningkatkan keterlibatan wisatawan. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama. Temuan ini menguatkan bahwa pengembangan wisata yang berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku bisnis. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, wisata glamping dapat menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kareumbi Wetan, para pelaku wisata, serta masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses observasi, pengumpulan data, dan dokumentasi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa, penghargaan diberikan kepada dosen pembimbing dan pihak fakultas atas bimbingan dan arahan selama proses praktik hingga penyusunan laporan ini selesai.

Referensi

- Adiyoso, W., & Martono, T. (2014). Empowering local community through tourism: A strategy to develop sustainable tourism. *International Journal of Social Science and Humanity*, 4(2), 123–126.
- Ashley, C., & Roe, D. (2002). Making tourism work for the poor: Strategies and challenges in southern Africa. *Development Southern Africa*, 19(1), 61–82.
- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5.
- Firdaus, R. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis komunitas. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 14(2), 45–56.
- Handayani, S. (2019). Peran pariwisata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 145–157.
- Marzuki, A., Hay, I., & James, J. (2012). Public participation shortcomings in tourism planning: The case of the Langkawi Islands, Malaysia. *Tourism Management*, 33(5), 1290–1302.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Nugroho, I., Negara, P. D., & Putra, A. D. (2016). Community-based tourism development: A strategy for sustainable tourism development in Indonesia. *International Journal of Tourism Sciences*, 16(1–2), 69–85.
- Rahmawati, D., Nurhadi, D., & Santoso, E. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 6(1), 23–34.
-

- Riger, S. (1993). What's wrong with empowerment. *American Journal of Community Psychology*, 21(3), 279–292.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Supriyadi, A., & Fitriani, R. (2020). Dampak pengembangan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 12(3), 198–210.
- Wibowo, T., & Santoso, R. (2021). Pengaruh infrastruktur terhadap pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan*, 8(4), 302–315.